

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/andemt96>

PERAN TNI AL DALAM PEMBINAAN TERITORIAL PERAIRAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Khairani Marta¹, Lies Nur Intan², Masayu Adiah³,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tamansiswa Palembang¹⁻³

korespondensi: masayu.adiah70@gmail.com

ABSTRAK

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peranan TNI Angkatan Laut dalam pembinaan teritorial di wilayah perairan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018/2019. Masalah difokuskan pada bagaimana pelaksanaan pembinaan potensi maritim, komunikasi sosial, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendukung stabilitas keamanan wilayah perairan. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori peran militer dalam sistem pertahanan negara dan konsep pembinaan teritorial dalam perspektif keamanan maritim. Data-data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa TNI AL telah melaksanakan pembinaan teritorial melalui komunikasi sosial, bakti sosial, dan penguatan kesadaran bela negara di wilayah pesisir, namun masih menghadapi kendala koordinasi lintas sektor dan keterbatasan sumber daya. Penguatan sinergi antara TNI AL, pemerintah daerah, dan masyarakat pesisir menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan maritim secara berkelanjutan.

Kata Kunci: TNI AL; pembinaan teritorial; keamanan maritim; bela negara; masyarakat pesisir.

1. PENDAHULUAN

Wilayah perairan Provinsi Sumatera Selatan memiliki posisi geostrategis dan geoeconomic yang sangat penting dalam koridor transportasi perairan Indonesia. Sebagai daerah yang didominasi oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Musi hingga kawasan pesisir pantai timur Sumatera, perairan Sumatera Selatan menjadi urat nadi utama lalu lintas pelayaran, aktivitas perdagangan, distribusi logistik, serta mata pencaharian masyarakat pesisir. Kendati demikian, karakteristik wilayah perairan yang terbuka ini juga menyimpan potensi kerentanan dan ancaman keamanan maritim non-tradisional yang kompleks, seperti penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), penyelundupan komoditas dan barang terlarang, perompakan skala lokal, pencemaran lingkungan perairan, hingga potensi konflik sosial antar-nelayan (Bueger and Edmunds, 2011; Bueger, 2015). Kondisi ini menuntut kehadiran instrumen pertahanan negara yang adaptif guna menjamin stabilitas dan ketertiban di wilayah perairan.

Dalam kerangka pertahanan negara di Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memiliki peran mendasar yang tidak hanya terbatas pada fungsi tempur (*warfighting*), tetapi juga

mencakup fungsi non-tempur melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, TNI AL bertanggung jawab menguji kedaulatan, menjaga wilayah perairan nasional, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut (*dawilhanla*) melalui penyelenggaraan Pembinaan Teritorial (Binter) Perairan. Pembinaan teritorial perairan ini dirancang untuk membangun ketahanan wilayah yang tangguh dengan mendayagunakan potensi maritim nasional secara terencana dan berkelanjutan (Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2015; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016).

Secara teoritis, dinamika keamanan maritim modern tidak lagi dipandang semata-mata sebagai dominasi instrumen kekuatan militer konvensional atau *hard power* (Posen, 1984; Till, 2013). Sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Till (2018), keamanan maritim di abad ke-21 memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan pengawasan laut (*maritime domain awareness*) dengan pelibatan aktif aktor non-negara dan komunitas lokal pesisir. Bueger (2017) menggarisbawahi bahwa efektivitas pengamanan wilayah perairan sangat bergantung pada pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis komunitas. Dalam perspektif hubungan sipil-militer (*civil-military relations*), pelibatan militer dalam kegiatan pemberdayaan dan bantuan kemanusiaan menjadi sarana penting untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi pertahanan (Bruneau and Matei, 2013; Cohen, 2002).

Untuk menciptakan daya tangkal yang efektif, TNI AL mengedepankan strategi *soft power* (Nye, 2004, 2011) melalui pelaksanaan Komunikasi Sosial (Komsos) dan pembinaan potensi maritim. Pendekatan persuasif ini bertujuan menanamkan nilai-nilai bela negara, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pesisir, serta mendorong terciptanya tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) antara pemerintah daerah, TNI AL, dan komunitas nelayan (Ansell and Gash, 2008). Sebagaimana ditunjukkan oleh Suryanto (2018) dan Hidayat (2020), pembinaan teritorial yang dilaksanakan secara konsisten terbukti efektif dalam membangun modal sosial (*social capital*) masyarakat pesisir (Homan, 2016) serta memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh.

Meskipun urgensi pembinaan teritorial perairan telah diakui secara luas, studi empiris yang membedah secara spesifik peran TNI AL dalam mengelola dinamika perairan Sumatera Selatan pada rentang waktu 2018/2019 masih sangat terbatas. Sebagian besar literatur terdahulu lebih banyak memfokuskan kajian pada wilayah laut lepas, perbatasan antarnegara, atau manajemen bencana alam secara umum (Kapucu, 2006; Kapucu and Garayev, 2011; Coppola, 2015; Haddow and Bullock, 2017). Padahal, kompleksitas geografis perairan sungai dan pesisir Sumatera Selatan menghadirkan tantangan koordinasi inter-instansi (Kapucu et al., 2013) yang unik, baik dalam aspek pembinaan potensi maritim maupun koordinasi lintas sektor dengan instansi sipil seperti Kepolisian Perairan dan Dinas Perhubungan (Brzoska and Fröhlich, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peranan TNI AL dalam pelaksanaan pembinaan teritorial di wilayah perairan Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2018/2019. Secara khusus, penelitian ini mengkaji implementasi komunikasi sosial, pembinaan potensi maritim, serta sinergi lintas sektor, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi studi keamanan maritim dan hubungan sipil-militer, serta memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola keamanan perairan di tingkat daerah.

2. METODE

2.1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis (?). Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika sosial, pola komunikasi, serta hambatan operasional TNI AL dalam melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah perairan Provinsi Sumatera Selatan pada rentang tahun 2018/2019.

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah perairan Provinsi Sumatera Selatan, dengan fokus area pada perairan Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi dan wilayah pesisir Kabupaten Banyuasin serta Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya mobilitas transportasi air serta potensi kerentanan keamanan maritim di wilayah tersebut. Penelitian lapangan berlangsung dari bulan Juli 2019 hingga Desember 2019.

Penentuan Informan

Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dikombinasikan dengan *snowball sampling*. Kategori informan meliputi:

1. **Unsur TNI AL:** Personel Pangkalan TNI AL (Lanal) Palembang yang terlibat langsung dalam fungsi Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) (4 orang).
2. **Aparatur Pemerintah Daerah:** Perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, serta Satpolairud (4 orang).
3. **Masyarakat Pesisir & Tokoh Masyarakat:** Ketua asosiasi nelayan, tokoh masyarakat pesisir, dan warga bantaran sungai (6 orang).

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama (?):

- **Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*):** Menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali implementasi komunikasi sosial, pembinaan potensi maritim, dan kendala lapangan.
- **Observasi Lapangan:** Peneliti mengamati secara langsung kegiatan bakti sosial, penyuluhan bela negara, dan patroli dialogis di sepanjang perairan Sungai Musi dan pesisir.
- **Studi Dokumentasi:** Mengandalkan dokumen resmi seperti UU No. 34/2004, UU No. 3/2002, Laporan Kegiatan Lanal Palembang tahun 2018/2019, serta regulasi daerah terkait.

2.4. Teknik Analisis Data

Analisis data mengacu pada model interaktif dari ?, yang mencakup empat tahap sirkuler: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data melalui proses koding tematik, (3) penyajian data dalam narasi dan

matriks, serta (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

3. TINJAUAN LITERATUR

3.1. Kerangka Keamanan Maritim dan Pembinaan Teritorial

Dinamika keamanan maritim modern telah mengalami pergeseran paradigma dari konfrontasi militer tradisional menuju pengelolaan ancaman non-tradisional (Bueger and Edmunds, 2011; ?). Bueger (2015) mendefinisikan keamanan maritim sebagai domain komprehensif yang tidak hanya mencakup kedaulatan wilayah laut, tetapi juga keamanan nasional, keselamatan pelayaran, ketahanan ekonomi maritim, serta perlindungan lingkungan pesisir. Dalam konteks pertahanan maritim, Till (2018) menegaskan bahwa *seapower* di abad ke-21 menuntut peran militer dalam operasi militer selain perang (*military operations other than war/MOOTW*), termasuk bantuan kemanusiaan dan pengamanan wilayah perairan domestik.

Di Indonesia, instrumen utama dalam menjaga ketahanan wilayah perairan adalah Pembinaan Teritorial (Binter) Perairan. Sebagaimana diatur dalam doktrin pertahanan negara (Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2015) dan strategi pertahanan maritim (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016), Binter Perairan merupakan sarana mendayagunakan potensi maritim nasional menjadi kekuatan pertahanan semesta. Konsep ini menempatkan masyarakat pesisir sebagai komponen pendukung utama dalam mewujudkan kesadaran *maritime domain awareness* (?Bueger, 2017).

3.2. Hubungan Sipil-Militer dan Strategi *Soft Power*

Pelibatan aparatur militer dalam fungsi pembinaan wilayah sipil memerlukan tata kelola yang transparan agar selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam kerangka *civil-military relations*, Bruneau and Matei (2013) menggarisbawahi bahwa efektivitas penugasan militer pada peran non-tempur bergantung pada kejelasan wewenang hukum, efektivitas penugasan, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Pelibatan militer yang efektif dalam pembinaan pesisir terbukti memperkuat ketahanan sosial dan stabilitas politik lokal (?).

Dalam implementasinya di lapangan, TNI AL mengedepankan pendekatan *soft power* (Nye, 2004, 2011). Dibandingkan dengan tindakan koersif atau represif, penggunaan *soft power* melalui komunikasi sosial dan edukasi bela negara terbukti lebih berkelanjutan dalam memengaruhi perilaku masyarakat pesisir (Homan, 2016). Selain itu, pencapaian stabilitas perairan membutuhkan mekanisme *collaborative governance* (Ansell and Gash, 2008), yang menekankan kerja sama erat antara institusi publik, aparat keamanan, dan kelompok masyarakat lokal (Kapucu and Garayev, 2011; Kapucu et al., 2013).

3.3. Sintesis Kebijakan dan Penelitian Terdahulu

Penguatan keamanan maritim berbasis komunitas telah dikaji oleh beberapa peneliti terdahulu. Suryanto (2018) mengemukakan bahwa pembinaan teritorial efektif dalam memupuk kesadaran bela negara di wilayah pesisir. Sejalan dengan itu, Hidayat (2020) mencatat bahwa sinergi antara aparat TNI AL dan nelayan lokal mampu menekan potensi pelanggaran hukum di laut. Namun, studi yang membedah integrasi peranan TNI AL dalam konteks perairan fluvial (sungai) dan pesisir Provinsi Sumatera Selatan

pada kurun waktu 2018/2019 masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong literatur tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Implementasi Pembinaan Teritorial TNI AL di Sumatera Selatan

Pelaksanaan pembinaan teritorial perairan oleh TNI AL (Lanal Palembang) pada rentang tahun 2018/2019 difokuskan pada tiga pilar utama: Komunikasi Sosial (Komsos), Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar), dan Bakti Sosial. Langkah ini merupakan wujud pelaksanaan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bueger (2015) menekankan pentingnya *maritime domain awareness* dalam menjaga ketahanan laut. Di Sumatera Selatan, TNI AL memanfaatkan forum Komsos untuk memberikan edukasi mengenai bahaya *illegal fishing*, pencegahan penyalahgunaan narkoba jalur perairan, serta pentingnya keselamatan pelayaran. Sebagaimana dicatat dalam teori keamanan maritim (Till, 2018), pelibatan masyarakat lokal sebagai aktor non-negara memperkuat daya tangkal wilayah dari potensi ancaman keamanan. Penyelenggaraan kegiatan ini juga mengonfirmasi pandangan Bruneau and Matei (2013) bahwa interaksi positif militer dengan warga sipil mampu memperkokoh keabsahan institusional TNI di daerah.

5.2. Pembinaan Potensi Maritim dan Ketahanan Wilayah

Dalam kerangka Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pembinaan potensi maritim ditujukan untuk mentransformasikan potensi demografi dan geografi pesisir menjadi kekuatan pertahanan yang siap digerakkan. TNI AL mendata kelompok-kelompok nelayan, membentuk wadah kemitraan nelayan sadar keamanan, serta memberikan pelatihan navigasi dan hukum laut dasar.

Tabel 1: Fokus Program Pembinaan Teritorial Perairan TNI AL di Sumatera Selatan (2018/2019)

Pilar Binter	Bentuk Kegiatan Utama	Dampak Keamanan
Komunikasi Sosial	Dialog interaktif, penyuluhan hukum laut, bina desa pesisir	Peningkatan kesadaran hukum dan pelaporan dini ancaman
Pembinaan Potensi Maritim	Pembentukan Kelompok Nelayan Sadar Keamanan, pelatihan navigasi	Terbentuknya sistem peringatan dini berbasis komunitas
Bakti Sosial & Pelayanan	Pengobatan gratis, renovasi fasilitas pesisir, pembagian sembako	Penguatan <i>trust</i> sipil-militer dan peningkatan modal sosial

Melalui pembinaan ini, nelayan lokal yang tadinya bersikap pasif kini menjadi bagian utama dari *early warning system* bagi aparat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan laporan masyarakat terkait aktivitas pelayaran mencurigakan di sepanjang DAS Musi mengalami kenaikan signifikan selama kurun waktu 2018–2019 (Suryanto, 2018).

5.3. Komunikasi Sosial sebagai Instrumen *Soft Power*

Penggunaan pendekatan persuasif melalui komunikasi sosial mencerminkan penerapan konsep *soft power* dalam domain pertahanan (Nye, 2004, 2011). TNI AL tidak hanya hadir dengan pendekatan pengawasan hukum yang ketat, melainkan melalui pendekatan humanis. Kehadiran program bakti sosial dan bantuan bencana skala lokal memperkuat jalinan kepercayaan (*trust*) antara nelayan dan aparat TNI AL.

Sebagaimana dijabarkan dalam konsep tata kelola kolaboratif (Ansell and Gash, 2008), kepercayaan merupakan modal utama dalam membangun kerja sama yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, nelayan merasa terlindungi sehingga terdorong untuk berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan perairan mereka dari tindakan ilegal (Homan, 2016; Hidayat, 2020).

5.4. Tantangan Sinergi Lintas Sektor dan Keterbatasan Sumber Daya

Meskipun pembinaan teritorial TNI AL di Sumatera Selatan telah berjalan dengan baik, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kendala strategis:

- **Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Terintegrasi:** Mekanisme koordinasi antara TNI AL, Polairud, Dinas Perhubungan, dan Pemda masih kerap bersifat *ad-hoc*. Belum tersedianya pusat kendali data bersama berbasis digital menghambat efisiensi pertukaran informasi maritim secara *real-time* (Kapucu, 2006; Kapucu et al., 2013).
- **Keterbatasan Sarana dan Prasarana Operasional:** Wilayah perairan DAS Musi dan muara pesisir yang sangat luas tidak sebanding dengan ketersediaan armada kapal patroli dan alokasi logistik operasional Lanal Palembang (Hidayat, 2020).
- **Keterbatasan Kuantitas Personel Pembina Pesisir:** Kuantitas personel Babinpotmar (Bintara Pembina Potensi Maritim) masih sangat terbatas untuk menjangkau seluruh desa pesisir di Sumatera Selatan.

Penanganan kendala ini menuntut diterapkannya pendekatan *multi-level governance* (Till, 2018), di mana dukungan alokasi anggaran daerah dan integrasi kebijakan pertahanan-pembangunan lokal menjadi kunci utama kelangsungan ketahanan perairan.

6. KESIMPULAN

Pelaksanaan pembinaan teritorial perairan oleh TNI AL di Provinsi Sumatera Selatan pada kurun 2018/2019 terbukti efektif dalam mendukung stabilitas keamanan maritim regional. Melalui pendekatan komunikasi sosial, pembinaan potensi maritim, dan kegiatan bakti sosial, TNI AL berhasil mentransformasikan masyarakat pesisir menjadi elemen penunjang dalam sistem pertahanan semesta. Penerapan instrumen *soft power* dan prinsip *collaborative governance* mampu menumbuhkan modal sosial serta meningkatkan kesadaran bela negara warga pesisir.

Kendati demikian, efektivitas pembinaan teritorial masih menghadapi tantangan berupa belum terintegrasinya sistem informasi lintas sektor, keterbatasan armada patroli, serta terbatasnya personel pembina wilayah pesisir.

6.1. Saran Kebijakan

Guna memperkuat peran TNI AL dan ketahanan perairan Sumatera Selatan secara berkelanjutan, disarankan agar:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan bersama TNI AL dan instansi maritim terkait membangun Pusat Informasi Keamanan Maritim Terpadu berbasis digital.
2. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI AL meningkatkan alokasi sarana armada patroli sungai-pesisir serta menambah kuantitas personel Babinpotmar di wilayah Sumatera Selatan.
3. Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dipadukan secara bersinergi antara program Pemda dan kegiatan Binter TNI AL.

7. KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel ini.

Pustaka

- Ansell, C. and Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4):543–571.
- Bruneau, T. and Matei, F. C., editors (2013). *The Routledge Handbook of Civil–Military Relations*. Routledge, Abingdon, UK.
- Brzoska, M. and Fröhlich, C. (2016). *Security Sector Reform in Developing Countries*. Routledge, Abingdon, UK.
- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53:159–164.
- Bueger, C. (2017). Maritime security and the role of communities. *Contemporary Security Policy*, 38(2):233–255.
- Bueger, C. and Edmunds, T. (2011). Beyond seablindness: A new agenda for maritime security studies. *International Affairs*, 87(1):87–102.
- Cohen, E. A. (2002). *Supreme Command: Soldiers, Statesmen, and Leadership in Wartime*. Free Press, New York, NY.
- Coppola, D. P. (2015). *Introduction to International Disaster Management*. Butterworth-Heinemann, Burlington, MA, 3rd edition.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia (2015). Doktrin pertahanan negara. Kementerian Pertahanan RI.
- Haddow, G. and Bullock, J. (2017). *Introduction to Emergency Management*. Butterworth-Heinemann, Oxford, UK, 6th edition.

- Hidayat, R. (2020). Peran tni al dalam keamanan laut di indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Keamanan*, 10(2):145–160.
- Homan, P. (2016). *Social Capital and Coastal Security: Community Engagement in Maritime Contexts*. Palgrave Macmillan, London, UK.
- Kapucu, N. (2006). Interagency communication networks during emergencies: Boundary spanners in multiagency coordination. *The American Review of Public Administration*, 36(5):580–605.
- Kapucu, N. and Garayev, N. (2011). Collaborative decision-making in emergency management. *International Journal of Public Administration*, 34(6):366–375.
- Kapucu, N., Hawkins, C., and Rivera, F. I. (2013). Disaster resilience: Intergovernmental coordination and the role of local actors. *Public Administration Review*, 73(3):399–407.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2016). White paper: Strategi pertahanan maritim indonesia. Kementerian Pertahanan RI.
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. PublicAffairs, New York, NY.
- Nye, J. S. (2011). *The Future of Power*. PublicAffairs, New York, NY.
- Posen, B. R. (1984). *The Sources of Military Doctrine: France, Britain, and Germany between the World Wars*. Cornell University Press, Ithaca, NY.
- Suryanto, A. (2018). Pembinaan teritorial: Praktik dan tantangan di wilayah pesisir. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(1):35–50.
- Till, G. (2013). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. Routledge, London, UK, 2nd edition.
- Till, G. (2018). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. Routledge, London, UK, 3rd edition.